

KSPI, KTPPU, TLRHP DAN OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Handoko Arianto, Meyzi Heriyanto dan Okta Karneli

Program Studi Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru

Abstract: KSPI, KTPPU, TLRHP and Opinion of BPK on Local Government Financial Report. The objectives of this research are to identify and analyze the influence of Internal Control System (KSPI), Findings of Disobedience to Legislation (KTPPU) and Follow-up Recommendation of Examination Result (TLRHP) to BPK's opinion. Population and sample in this research are Province LKPD Entity and 12 Regency / City in Riau Province which become object of Inspection of Financial Statement (LK) and Inspection with Specific Purposes (PDTT) by BPK Representative of Riau Province 2010 - 2016. Analytical tool used is multiple linear regression. The results showed that partially independent variables consisting of KSPI findings, KTPPU and TLRHP findings have a significant influence on BPK's opinion on provincial LKPD and 12 districts / cities in Riau Province in 2010-2016. While simultaneously, the influence of the three independent variables on the dependent variable is equal to 74.7%. Thus, there are still 25.3% more other factors that influence the CPC Opinion outside the regression model.

Keywords: kspi, ktpu, tlrhp and bpk opinion

Abstrak: KSPI, KTPPU, TLRHP dan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (KSPI), Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan (KTPPU) dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) terhadap Opini BPK. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Entitas LKPD Provinsi dan 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang menjadi objek Pemeriksaan Laporan Keuangan (LK) dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) oleh BPK Perwakilan Provinsi Riau tahun 2010 - 2016. Alat analisis penelitian yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial ketiga variabel independen yang terdiri dari Temuan KSPI, Temuan KTPPU dan TLRHP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Opini BPK pada LKPD Provinsi dan 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2010-2016. Sedangkan secara simultan, pengaruh ketiga variabel independen tersebut terhadap variabel dependen adalah sebesar 74,7%. Sehingga, masih ada 25,3% lagi faktor lain yang mempengaruhi Opini BPK diluar model regresi.

Kata kunci: kspi, ktpu, tlrhp dan opini bpk

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah berjalan lebih dari lima belas tahun sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi dengan terjadinya desentralisasi fiskal ke Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan serta program pembangunan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan daerah setempat sehingga diharapkan proses pemerataan pemba-

ngunan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah (Mardiasmo, 2006).

Pilar utama pengelolaan sumber daya keuangan khususnya pada institusi pemerintah daerah adalah sistem *good governance* dengan unsur terpenting adalah akuntabilitas (Puspasari, 2012). Pengelolaan keuangan negara ataupun daerah tersebut telah mengalami berbagai perubahan regulasi dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*. Menurut Adhitya (2013), pengelolaan keuangan daerah dapat dikatakan baik apabila daerah tersebut mampu mengelola keuangan daerah sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan. Selanjutnya Utomo (2012), mengungkapkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti: ketetapan waktu penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perda tentang Perubahan APBD, kualitas pendapatan, persentase realisasi APBD, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu, serta yang terpenting adalah opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD.

Hal tersebut menjadikan pengembangan sektor publik di Indonesia pasca reformasi melalui penguatan tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di tingkat pusat maupun daerah, semakin krusial untuk dilakukan (Mardiasmo, 2006). Selanjutnya Syakhroza (2008), mengemukakan bahwa *good governance* selalu mengacu kepada sikap, etika, praktik, dan nilai-nilai masyarakat. Bentuk konkret komitmen pemerintah atas tuntutan akuntabilitas adalah menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban keuangan pemerintah tersebut yang mana penilaian kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasinya dalam bentuk opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006.

Dalam membuat pertanggungjawaban, Kepala Daerah juga diwajibkan untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat melalui Presiden mengatur dan menyelenggarakan SPI di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh sesuai Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang ditetapkan lebih lanjut dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sebagai pemegang kekuasaan eksaminatif/inspektif, BPK-RI melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah dan membuat suatu laporan hasil audit keuangan. Atas audit yang dilakukan, BPK menyatakan opini yang disertai dengan laporan hasil audit atas SPI dan laporan audit atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Efektivitas SPI merupakan salah satu pendekatan yang digunakan oleh BPK dalam meneliti kewajaran informasi keuangan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 pada penjelasan Pasal 16 ayat (1). Hal ini mengindikasikan bahwa SPI memiliki peran penting dalam penentuan keputusan audit, mulai dari penyusunan rencana audit hingga pemberian opini atau kesimpulan akhir audit.

Merujuk pada Buletin Teknis 01 tentang Pelaporan Hasil Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah pada Paragraf 13 dan petunjuk pelaksanaan pemeriksaan keuangan BPK tentang jenis opini serta merujuk pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara diketahui bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada: (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian internal. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK yaitu opini Wajar Tanpa Pengecua-

lian WTP (*unqualified opinion*), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) *qualified opinion*, opini Tidak Wajar (TW) *adverse opinion*, dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) *disclaimer of opinion*. Opini audit merupakan faktor penting yang menjadi tolak ukur dari efektivitas pengawasan dan penilaian kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Virgasari, 2009).

Berdasarkan *agency theory*, pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sehingga penelitian ini penting dan menarik untuk dilakukan karena fenomena menunjukkan bahwa LKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2010-2015 yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) masih belum mencapai 100%.

Walaupun dalam berbagai kesempatan Ketua BPK menekankan bahwa opini WTP belum tentu bebas korupsi, namun bagi pandangan masyarakat awam seharusnya opini WTP hanya diberikan kepada Pemerintah Daerah yang bebas dari korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan antara opini WTP dengan opini bebas korupsi sehingga yang kemudian menjadi faktor penting dilakukannya penelitian atas pemberian opini oleh BPK.

Salah satu pendekatan dalam pemberian opini adalah evaluasi atas efektivitas SPI. SPI dinyatakan efektif apabila mampu memberikan keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan entitas, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (BPK-RI). Seperti diketahui bahwa selain memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK juga mengungkapkan permasalahan pada entitas Pemerintah Daerah yang diantaranya terdapat dua jenis temuan, yaitu terkait Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (KSPI) dan Ketidakepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan (KTPPU).

Permasalahan utama kelemahan SPI pada Pemerintah Provinsi dan 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tersebut terletak pada proses penyusunan laporan yang tidak sesuai ketentuan, pencatatan tidak/belum dilakukan secara akurat, penetapan/pelaksanaan kebijakan yang tidak tepat atau belum dilakukan sehingga mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan/pendapatan, belum adanya *Standard Operating Prosedur* (SOP) yang formal atau SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati. Selain itu, satuan pengawas internal yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal yang ditunjukkan dengan belum ditindak lanjutinya temuan pemeriksaan sebelumnya (LHP BPK RI Perwakilan Prov. Riau dan 12 Daerah Kabupaten/Kota, 2016).

Temuan KTPPU merupakan hasil dari pemeriksaan atas kepatuhan entitas Pemerintah Daerah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk mendeteksi salah saji material akibat proses pelaksanaan pengelolaan dan penyusunan LKPD. BPK mengelompokkan temuan KTPPU kedalam lima kelompok, yaitu kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, temuan administrasi, dan indikasi tindak pidana.

Pada kondisi ini, transparansi hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara/daerah dan tindak lanjut rekomendasi BPK terhadap laporan keuangan yang dibuat Pemda lebih terlihat dan hal ini merupakan sisi positif dari reformasi birokrasi yang terjadi selama ini di tanah air (Purba, 2014). Namun demikian, pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tersebut terkadang tidak berjalan mulus karena berbagai kendala yang terjadi di daerah terutama terkait dengan kondisi topografi daerah dan dugaan keterlibatan pejabat atau orang berpengaruh di daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian adalah apakah temuan KSPI, temuan KTPPU, dan TLRHP berpengaruh terhadap Opini BPK pada LKPD Provinsi dan 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2010-2016?. Penelitian yang paling mirip dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilaku

kan oleh Darmawati (2017) namun dengan objek penelitian yang masih sangat umum, yaitu pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota se Indonesia. Rentang waktu penelitian tersebut adalah tahun 2010 s.d. 2014 dengan data yang digunakan adalah hasil pemeriksaan laporan keuangan. Sedangkan, penelitian ini meneliti objek yang lebih spesifik, yaitu pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Provinsi Riau dengan rentang waktu penelitian tahun 2010 s.d. 2016 serta menggunakan data hasil pemeriksaan laporan keuangan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (KSPI), Ketidapatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan (KTPPU), dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) berpengaruh signifikan terhadap opini BPK. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh KSPI, KTPPU, dan TLRHP terhadap opini BPK pada LKPD Provinsi dan 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2010-2016.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Entitas LKPD Pemerintah Provinsi dan 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang menjadi objek pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Riau tahun 2010-2016. Sampel diambil dari seluruh populasi (metode sensus). Data diperoleh dengan mengumpulkan dan mempelajari dari sumber sekunder yang dilanjutkan dengan pencatatan dan penghitungan. Data tersebut dikumpulkan melalui website resmi www.bpk.go.id maupun permintaan data laporan hasil pemeriksaan dan hasil pemantauan oleh BPK Perwakilan Provinsi Riau. Analisis data menggunakan analisa regresi linear berganda untuk menganalisa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis regresi linear berganda yang nantinya dilakukan dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + a$$

Dimana:

- Y = Opini BPK
 X_1 = Kelemahan (SPI)
 X_2 = Ketidak Patuhan Terhadap Perundang-Undangan
 X_3 = Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
 a = Konstanta

HASIL

Secara umum data penelitian yang menunjukkan rata-rata jumlah Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (KSPI) = X_1 ; jumlah Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan (KTPPU) = X_2 ; tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) = X_3 ; dan nilai Opini BPK = Y pada LKPD Provinsi dan 12 Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau tahun 2010-2016 dapat disajikan dalam tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Rata-Rata KSPI, KTPPU, TLRHP dan Opini BPK pada LKPD Provinsi dan 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2010-2016

Tahun	KSPI (Jumlah Temuan)	KTPPU (Jumlah Temuan)	TLRHP (%)	Opini BPK (Nilai)
2010	8	18	58	3
2011	10	18	67	3
2012	8	23	59	3
2013	16	24	60	4
2014	19	17	60	4
2015	20	18	58	3
2016	20	20	55	4

Sumber : LHP dan LHPt BPK RI diolah, 2017

Dari tabel diatas terlihat bahwa secara keseluruhan dari LKPD Provinsi dan 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau selama periode tahun 2010-2016 rata-rata menunjukkan bahwa:

1. Temuan KSPI terbanyak pada tahun 2015 dan 2016 yaitu rata-rata sebanyak 20 temuan. Sedangkan rata-rata Temuan KSPI yang paling sedikit yaitu pada tahun 2010 dan 2012 dengan rata-rata hanya sebanyak 8 temuan.
2. Temuan KTPPU terbanyak juga pada tahun 2013 yaitu rata-rata sebanyak 24 temuan.

- Sedangkan rata-rata Temuan KTPPU yang paling sedikit yaitu pada tahun 2014 dengan rata-rata hanya sebanyak 17 temuan.
- Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) tertinggi terjadi pada tahun 2011, yaitu rata-rata sebesar 67%. Rata-rata tingkat penyelesaian tindak lanjut tertinggi terjadi pada tahun 2011 dimana dari jumlah rekomendasi sebanyak 5.319 telah ditindaklanjuti Sesuai Rekomendasi (SSR) sebanyak 4.319 atau 67%. Adapun rata-rata TLRHP yang paling rendah terjadi pada tahun 2016 dengan rata-rata hanya sebanyak 55%.
 - Rata-rata Opini BPK yang tertinggi yaitu pada tahun 2013, 2014, dan 2016 dengan nilai rata-rata 4.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 21. Penulisan persamaan regresi linear berganda dapat dilakukan dengan menginterpretasikan angka-angka yang ada didalam kolom *Unstandardized Coefficient* Beta seperti pada tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2. Hasil Perhitungan Analisis Regresi Linear Berganda

Independent Variabel	Unstandardized Coefficients B
(Constant)	0,356
Ln_Sistem Pengendalian Intern	0,591
Ln_Ketidak Patuhan	0,702
Ln_Tindak Lanjut Rekomendasi	0,635

Sumber : Data Olahan SPSS, Lampiran 3 : *Coefficients^a*

Berdasarkan angka yang berada pada kolom *Unstandardized Coefficient Beta* dari tabel 6 diatas, maka dapat disusun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + a$$

Menjadi:

$$Y = 0,591X_1 + 0,702X_2 + 0,635X_3 + 0,356$$

Dimana:

- Y = Opini BPK
 X1 = Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (KSPI)
 X2 = Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan (KTPPU)
 X3 = Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP)
 a = Konstanta

Persamaan regresi linier berganda antara variabel bebas Temuan KSPI = X1, Temuan KTPPU = X2, dan TLRHP = X3 terhadap variabel terikat Opini BPK = Y dapat diartikan sebagai berikut:

- Nilai koefisien *Unstandardized Coefficients* Beta variabel Temuan KSPI sebesar 0,591 mempunyai arti setiap kenaikan jumlah Temuan KSPI sebesar 1 satuan maka akan berpengaruh positif terhadap Opini BPK sebesar 0,591 satuan.
- Nilai koefisien *Unstandardized Coefficients* Beta variabel Temuan KTPPU sebesar 0,702 mempunyai arti setiap kenaikan jumlah Temuan KTPPU sebesar 1 satuan maka akan berpengaruh positif terhadap Opini BPK sebesar 0,702 satuan.
- Nilai koefisien *Unstandardized Coefficients* Beta variabel TLRHP sebesar 0,635 mempunyai arti setiap kenaikan tingkat TLRHP sebesar 1 satuan maka akan berpengaruh positif terhadap Opini BPK sebesar 0,635 satuan.

Hasil Pengujian Parsial (Uji t)

Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis (Uji t)

Variabel Independen	t hitung	t tabel	(Sig)	α	Hasil
Temuan KSPI = X1	3,422	1,66	0,023	0,05	Berpengaruh Signifikan
Temuan KTPPU = X2	5,056	1,66	0,006	0,05	Berpengaruh Signifikan
TLRHP = X3	3,769	1,66	0,011	0,05	Berpengaruh Signifikan

Sumber : Data Olahan SPSS, Lampiran 3 : *Coefficients^a*

Adapun penjabaran hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji t untuk masing-masing variabel independen sebagaimana terlihat pada tabel 3 adalah sebagai berikut.

1. Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama menyatakan bahwa : Temuan KSPI berpengaruh terhadap Opini BPK. Dari hasil signifikansi uji t seperti pada tabel 3 diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,422 dan nilai t_{tabel} sebesar 1,66 yang artinya $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan derajat signifikansi $0,023 < \alpha 0,05$. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa secara statistik Temuan KSPI mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Opini BPK atas LKPD Provinsi dan 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2010-2016. Dengan demikian, H_0 diterima dan H_a ditolak.

2. Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua menyatakan bahwa: Temuan KTPPU berpengaruh terhadap Opini BPK. Dari hasil signifikansi uji t seperti pada tabel 3 diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 5,056 dan nilai t_{tabel} sebesar 1,66 yang artinya $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan derajat signifikansi $0,006 < \alpha 0,05$. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa secara statistik Temuan KTPPU mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Opini BPK atas LKPD Provinsi dan 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2010-2016. Dengan demikian, H_0 diterima dan H_a ditolak.

3. Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa: TLRHP berpengaruh terhadap Opini BPK. Dari hasil signifikansi uji t seperti pada tabel 3 diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,769 dan nilai t_{tabel} sebesar 1,66 yang artinya $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan derajat signifikansi $0,011 < \alpha 0,05$. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa secara statistik TLRHP mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Opini BPK atas LKPD Provinsi dan 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2010-2016. Dengan demikian, H_0 diterima dan H_a ditolak.

Hasil Uji Simultan (Uji F)

Hipotesis keempat menyatakan bahwa Temuan KSPI, Temuan KTPPU, dan TLRHP secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Opini BPK. Hipotesis keempat ini diuji dengan menggunakan uji F (Uji simultan). Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama (*simultan*) berpengaruh terhadap variabel dependennya (Algifari, 2010). Adapun hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Analisis Hipotesis Uji F (ANOVA^a)

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.490	3	.163	4.625	.005 ^b
	Residual	3.072	87	.035		
	Total	3.562	90			

a. Dependent Variable: Ln_Opinii BPK

b. Predictors: (Constant), Ln_Tindak Lanjut Rekomendasi, Ln_Sistem Pengendalian Intern, Ln_Ketidak Patuhan

Sumber : Data Olahan SPSS, Lampiran 3, ANOVA^a.

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat diketahui bahwa dari uji simultan menghasilkan nilai F_{hitung} sebesar 4,625 dengan tingkat signifikansi 0,005. Nilai F_{tabel} untuk model regresi diatas adalah 2,71 (*degree of freedom* (df) = n – k) sehingga nilai F_{hitung} 4,625 > nilai F_{tabel} 2,71 dengan sig 0,005 < 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari Temuan KSPI = (X1); Temuan KTPPU = (X2); dan TLRHP = (X3) secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, yaitu Opini BPK.

Koefisien Determinasi (R-Square)

Persentase pengaruh seluruh variabel independen yang terdiri dari : Temuan SPI = (X1), Temuan KTPPU = (X2) dan TLRHP = (X3) terhadap nilai variabel dependen, yakni Opini BPK = (Y) ditunjukkan oleh besarnya nilai koefisien determinasi (*R-Square*). Koefisien determinasi (*R-Square*) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa besar suatu model yang diterapkan dapat menjelaskan variabel dependennya. Hasil

perhitungan koefisien determinasi (*R-Square*) dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (*R-Square*)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.772 ^a	.747	.709	.18793	1.725

a. Predictors: (Constant), Ln_Tindak Lanjut Rekomendasi, Ln_Sistem Pengendalian Intern, Ln_Ketidak Patuhan

b. Dependent Variable: Ln_Opinii BPK

Sumber : Data olahan SPSS versi 21, Lampiran 3 (Model Summary^b).

Dari nilai koefisien determinasi (*R-Square*) dapat diketahui bahwa derajat ketepatan suatu analisis regresi linear berganda sehingga menunjukkan besarnya variasi sumbangan seluruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Besarnya pengaruh tersebut ditunjukkan oleh tabel 5 melalui nilai *R-Square* sebesar 0,747. Dimana, pengaruh Temuan KSPI = (X1), Temuan KTPPU = (X2) dan TLRHP = (X3), terhadap variabel dependen, yaitu Opini BPK = Y adalah sebesar 74,7%. Sedangkan, pengaruh variabel lain diluar ketiga variabel independen tersebut yang menjelaskan variasi perubahan terhadap Opini BPK adalah sebesar 25.3%, seperti variabel materialitas audit dan pelanggaran SAP.

PEMBAHASAN

Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa Temuan KSPI berpengaruh terhadap Opini BPK pada LKPD Provinsi dan 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2010-2016. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa kenaikan jumlah Temuan KSPI sebesar 1 satuan akan berpengaruh positif terhadap peningkatan Opini BPK sebesar 0,591 satuan. Artinya, semakin banyak permasalahan kelemahan SPI yang ditemukan oleh BPK pada tahun tersebut, maka akan semakin baik kewajaran penyajian laporan keuangan entitas tersebut dalam tahun berkenaan.

Hal tersebut berbeda dengan hasil penelitian Fatimah, Sari, dan Rasuli (2014) yang menyimpulkan bahwa kelemahan sistem pengendalian interen (SPI), ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kasus kerugian daerah/perusahaan, dan penyimpangan administrasi berpengaruh negatif terhadap opini WTP. Perbedaan tersebut bisa saja terjadi dengan penjelasan bahwa permasalahan kelemahan SPI yang ditemukan oleh BPK selama pemeriksaan pada tahun tersebut segera diperbaiki oleh entitas pemerintah daerah. Perbaikan yang dilakukan oleh entitas pemerintah daerah pada hal-hal yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan mendorong BPK untuk memberikan opini yang lebih baik atas laporan keuangan pada tahun tersebut.

Hasil penelitian terdahulu yang juga berbeda dengan hasil penelitian ini diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Rina, A. (2013). Penelitian tersebut menghubungkan jumlah/nilai permasalahan kelemahan SPI dengan opini audit BPK yang mana menghasilkan kesimpulan bahwa kelemahan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pemberian opini audit BPK. Demikian juga hasil penelitian yang dilakukan oleh Maabuat, J.S. Morasa, J. & Saerang, D. P. E. (2015), terdapat perbedaan dimana permasalahan kelemahan struktur pengendalian internal yang merupakan bagian dari temuan KSPI tidak berpengaruh terhadap opini audit BPK. Penelitian tersebut menguraikan bagian dari temuan KSPI yang berpengaruh terhadap opini audit BPK adalah permasalahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan dan permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja.

Adapun hasil penelitian terdahulu yang tidak berbeda jauh dengan penelitian ini diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2014) dengan kesimpulan bahwa kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan kelemahan struktur pengendalian internal secara parsial berpengaruh signifikan

terhadap pemberian opini BPK. Demikian juga penelitian oleh Darmawati (2017) menyimpulkan bahwa kelemahan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap opini BPK.

Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa Temuan KTPPU berpengaruh terhadap Opini BPK pada LKPD Provinsi dan 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2010-2016. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa kenaikan jumlah Temuan KTPPU sebesar 1 satuan maka akan berpengaruh positif terhadap Opini BPK sebesar 0,702 satuan. Artinya, semakin banyak permasalahan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang ditemukan oleh BPK pada tahun tersebut, maka akan semakin baik kewajaran penyajian laporan keuangan entitas tersebut dalam tahun berkenaan.

Hal tersebut berbeda dengan hasil penelitian Fatimah, Sari, dan Rasuli (2014) yang menyimpulkan bahwa kelemahan sistem pengendalian interen (SPI), ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kasus kerugian daerah/perusahaan, dan penyimpangan administrasi berpengaruh negatif terhadap opini WTP. Perbedaan tersebut bisa saja terjadi dengan penjelasan bahwa penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang ditemukan oleh BPK selama pemeriksaan pada tahun tersebut segera diperbaiki oleh entitas pemerintah daerah. Perbaikan yang dilakukan oleh entitas pemerintah daerah pada hal-hal yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan mendorong BPK untuk memberikan opini yang lebih baik atas laporan keuangan pada tahun tersebut.

Hasil penelitian terdahulu yang juga berbeda dengan hasil penelitian ini diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Rina, A. (2013). Penelitian tersebut menghubungkan jumlah/nilai permasalahan ketidakpatuhan dengan opini audit BPK yang mana menghasilkan kesimpulan bahwa ketidakpatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh terhadap pemberian opini audit BPK. Demikian juga hasil penelitian yang dilakukan oleh Maabuat, J.S.

Morasa, J. & Saerang, D. P. E. (2015), terdapat perbedaan dimana permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang menyebabkan potensi kerugian daerah, kekurangpenerimaan, dan penyimpangan administrasi yang merupakan bagian dari temuan KTPPU tidak berpengaruh terhadap opini audit BPK. Penelitian tersebut menguraikan bagian dari temuan KTPPU yang berpengaruh terhadap opini audit BPK adalah permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah.

Adapun hasil penelitian terdahulu yang tidak berbeda jauh dengan penelitian ini diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2014) dengan kesimpulan bahwa ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah dan potensi kerugian daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pemberian opini BPK. Demikian juga penelitian oleh Darmawati (2017) menyimpulkan bahwa ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan berpengaruh signifikan terhadap opini BPK. Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil penelitian Yunawati, S. (2016), yang menyimpulkan bahwa opini Wajar Dengan Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat disebabkan adanya temuan kasus Ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.

Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa TLRHP berpengaruh terhadap Opini BPK pada LKPD Provinsi dan 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2010-2016. Ho diterima dan Ha ditolak berarti semakin besar tindak lanjut rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh para pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab maka akan semakin rendah tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan entitas tersebut sehingga menurunkan kemungkinan perolehan opini WTP pada tahun berkenaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adelia Pramita Sari, Dwi Martani & Dyah

Setyaningrum (2014) dan Darmawati (2017) yang menyimpulkan bahwa tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh signifikan terhadap Opini BPK.

Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa Temuan KSPI, Temuan KTPPU, dan TLRHP secara simultan berpengaruh terhadap Opini BPK pada LKPD Provinsi dan 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2010-2016. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2014) dengan kesimpulan bahwa bagian dari temuan KSPI dan temuan KTPPU secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pemberian opini audit oleh BPK. Demikian juga hasil penelitian oleh Darmawati (2017) yang menyimpulkan bahwa kelemahan sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh signifikan terhadap opini BPK.

Selanjutnya, hasil analisis koefisien determinasi (*R-Square*) menunjukkan bahwa pengaruh ketiga variabel bebas secara bersamaan terhadap variabel terikat adalah sebesar 74,70%. Artinya, terdapat faktor selain variabel penelitian ini sebesar 25,30% yang turut berpengaruh dalam pemberian opini BPK. Adapun faktor-faktor tersebut yaitu materialitas audit, penyelesaian kerugian daerah, hubungan kerja partai politik, lembaga perwakilan, dan kepala daerah.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Temuan KSPI dan Temuan KTPPU berpengaruh signifikan terhadap Opini BPK pada LKPD Provinsi dan 12 Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau tahun 2010-2016. Semakin banyak permasalahan kelemahan SPI dan penyimpangan atas peraturan perundang-undangan yang ditemukan oleh BPK selama pemeriksaan pada tahun tersebut, maka dengan tindak lanjut perbaikan yang memadai akan mendorong BPK untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan pada tahun tersebut menjadi lebih baik. Demikian juga, TLRHP berpengaruh signifikan terhadap Opini BPK pada LKPD Provinsi dan 12

Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2010-2016.

Besarnya pengaruh seluruh variabel independen Temuan KSPI, Temuan KTPPU, dan TLRHP terhadap variabel dependen Opini BPK yang dapat diterangkan oleh persamaan dalam penelitian ini adalah sebesar 74,7%. Sedangkan 25,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi, diantaranya materialitas audit, penyelesaian kerugian daerah, dan hubungan kerja antara partai politik melalui lembaga perwakilan dengan kepala daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut yang dapat menguraikan perbaikan/tindak lanjut apa saja yang dapat dengan cepat meningkatkan pemberian opini oleh BPK. Penelitian selanjutnya juga perlu untuk meneliti variabel independen lainnya, seperti materialitas audit dan kedalaman nilai temuan, tingkat pengembalian/penyetoran atas kerugian daerah, dan keterwakilan partai politik pada lembaga perwakilan rakyat.

DAFTAR RUJUKAN

- Mardiasmo. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nugroho, Agung. 2010. *Strategi Jitu memilih Metode statistic Penelitian dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi.
- Virgasari. 2009. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAPI.
- Adhitya, C. 2013. Faktor-Faktor Yang Mendorong Akuntan Publik Memberikan Pendapat Selain Wajar Tanpa Pengecualian. *Publikasi Ilmiah*. Surabaya: Universitas Widyatama.
- Adelia Pramita Sari, Dwi Martani & Dyah Setyaningrum. 2014. Pengaruh Temuan Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Opini Audit melalui Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga. *Jurnal Pascasarjana Ilmu Akuntansi*. Universitas Indonesia.
- Darmawati. 2017. Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh signifikan terhadap opini BPK pada LKPD Provinsi dan 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2010-2016.

- dakpatuhan terhadap Perundang-Undangan, dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan terhadap Opini BPK RI. *Tesis* (tidak dipublikasi). Universitas: Lampung.
- Fatimah, D., Sari, R.N. & Rasuli, M. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Opini Audit Tahun Sebelumnya dan Umur Pemerintah Daerah terhadap Penerimaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Seluruh Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 3 (1).
- Handayani, R.W. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemberian Opini Audit Oleh BPK RI Atas LKPD Provinsi, Kabupaten dan Kota Di Kalimantan Barat. *Jurnal*. Magister Manajemen Universitas Tanjungpura.
- Purba, C.B. 2014. Opini dan Status Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Pada Pemerintah Daerah Di Kalimantan Barat, Tengah, dan Timur. *Jurnal Akuntansi*. 18 (3). Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Puspasari. 2012. Otonomi daerah:kualitas pelayanan publik meningkat?. *Jurnal Birokrat Ilmu Administrasi Publik*, 1 (1).
- Rina, Andayani. 2016. Analisis Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern & Ketidakpatuhan Atas Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Opini LKKL. *Masters Thesis* (tidak dipublikasi). Universitas Andalas.
- Syakhroza. 2008. Pengaruh Pemeriksaan Interim, Lingkup Audit, Dan Independensi Terhadap Pertimbangan Opini Auditor.
- Utomo. 2012. Efisiensi dan Efektivitas Sistem Pengelolaan Keuangan Di Propinsi DKI Jakarta. *Tesis* (tidak dipublikasi). Yogyakarta: UGM.
- Yunawati, S. 2016. Analisis Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*. 5 (1).